



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

DOOR TO DOOR: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto didampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menyerahkan sertifikat tanah ke warga.

PORONG- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan secara simbolis 50 sertifikat tanah ke warga korban lumpur di Desa Renojoyo, Kecamatan Porong, Kamis (23/11). Total ada 650 warga yang akan mendapat sertifikat tersebut.

Hadi mengungkapkan, hampir 15 tahun warga tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. "Hari ini (kemarin, red) saya serahkan sertifikat secara *door to door*, semuanya saya tanya rata-rata gratis," ucapnya.

Meskipun, imbuhnya, terdapat lima keluarga yang membayar sesuai dengan pendapatan negara bukan pajak. Hal tersebut digunakan untuk pengukuran, biaya panitia dan biaya pendaftaran. Total biaya yang dikeluarkan sebanyak kurang dari Rp 600 ribu.

"Rata-rata semuanya gratis, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) digratiskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)," jelasnya.

Hadi berpesan, jika dalam proses sertifikasi tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan,

yakni gratis atau membayar pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp 600 ribu agar segera dilaporkan. Laporan tersebut dapat disampaikan ke kepala kantor pertanahan, dibantu oleh Kapolresta dan Dandim.

"Saya yakinkan tidak ada mafia tanah yang bermain pada korban lumpur lapindo," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, BPN Sidoarjo ingin memastikan posisi ketidakjelasan sertifikat tanah yang sudah terlampaui lama. Sehingga ia bersyukur semuanya telah jelas.

"Beliau (Hadi Tjahjanto, red) sangat semangat sekali, ingin memastikan akan kehadiran Pemerintah kepada masyarakat yang sedang terkena bencana dan kemudian mendapatkan kepastiannya," terangnya.

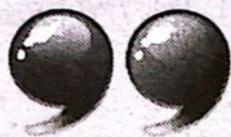
Secara perlahan, Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu menuntaskan permasalahan tanah di Sidoarjo. "Saat ini tinggal delapan orang yang akan kami tuntaskan, tapi ngapunten (mohon maaf, red) dicari alamatnya belum

● Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner

Jelang Pemilu, Dispendukcapil Pastikan Semua Warga Punya E-KTP

KOTA-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo intensif melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di sekolah-sekolah. Mencapai hingga tiga sekolah dalam seminggu.



Terutama bagi mereka yang belum tersentuh oleh program ini.”

Reddy Kusuma
Kepala Dispendukcapil
Sidoarjo

Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, langkah itu diambil untuk memastikan bahwa semua warga yang sudah cukup umur memiliki e-KTP. Apalagi saat ini seiring

dengan mendekatnya pemilihan umum (pemilu).

Menyadari keterbatasan akses warga desa, Dispendukcapil Sidoarjo juga menggelar program jemput bola ke desa-desa. Tujuannya adalah memudahkan warga desa untuk mengurus e-KTP tanpa harus datang ke kantor kecamatan atau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lingkar Timur.

Dalam upaya memaksimalkan pelayanan, Dispendukcapil Sidoarjo berencana membuka layanan di Sabtu dan Minggu. "Terutama bagi mereka yang belum tersentuh oleh program ini," ujarnya.

● Ke Halaman 10

Cegah Genangan, 27 Ribu ASN Siap Membuat Biopori

KOTA-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo berencana menggelar kegiatan pembuatan biopori secara bersamaan yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang.

Kepala BKD Sidoarjo Makhmud mengatakan, biopori, yang merupakan lubang kecil di tanah berfungsi untuk menyerap air hujan. Selain itu juga membuat wadah pengumpulan sampah organik.

Dia menjelaskan, konsep itu diharapkan dapat mengurangi dampak sampah di lingkungan. Sekaligus memanfaatkan air hujan secara optimal. "Setiap rumah pegawai akan membuat dua



PERSIAPAN: Rapat koordinasi dan mengecek lokasi pembuatan biopori.

biopori, bisa juga ditempatkan baik di kantor maupun di Ruang Terbuka Hijau (RTH)," ujarnya.

Seremoni pembuatan biopori akan dilaksanakan di Desa Tropodo. Lokasi tersebut dipilih karena daerahnya

sering mengalami banjir. Seremoni akan berlangsung di balai desa dan melibatkan seluruh Kepala Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sidoarjo.

"Total akan dibuat 60 biopori bersama dengan Bupati Sidoarjo," imbuhnya.

Sebelumnya, sebanyak 27 ribu ASN di Kabupaten Sidoarjo telah menjalani pelatihan cara membuat biopori beberapa waktu lalu di BKD.

Dengan partisipasi seluruh ASN dalam kegiatan itu, Makhmud berharap dapat tercipta dampak positif. Berupa peningkatan kapasitas penyerapan air dan pengurangan jumlah sampah organik.

Misalnya, jika setiap pegawai dapat membuat biopori dengan kapasitas menampung 2 liter, maka secara total akan mampu menampung 54 ribu liter air dan mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan oleh ASN Kabupaten Sidoarjo. (nis/vga)



EKSEKUSI: Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin mengecek mobil lelang.

DIKY PUTRA SANSIR/RADAR SIDOARJO

Tunggak Pajak, Kemenkeu Jatim Lelang Aset Serentak

GEDANGAN-Kemenkeu (Kementerian Keuangan) Satu Jawa Timur (Jatim) adakan lelang serentak yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kamis (23/11).

Aset yang dilelang terdiri dari motor, mobil, tanah, bangunan, barang elektronik, ponsel, sepeda, dan juga logam mulia. Barang yang dilelang merupakan milik wajib pajak yang menunggak pajak bertahun-tahun. Lelang eksekusi yang dilaksanakan diikuti oleh 30 kantor pelayanan pajak.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin mengata-

kan, Kanwil DJKN Jatim dengan Kanwil DJP Jatim dan Kanwil DJ-BC Jatim bersinergi dan berkolaborasi dalam kegiatan lelang serentak.

"Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memberikan efek jera kepada penunggak pajak," ujarnya.

Vita mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam rangka penegakan hukum pajak untuk mengamankan penerimaan negara melalui kegiatan lelang serentak.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal

Pajak Eka Sila Kusna Jaya mengatakan, lelang serentak ini terdiri dari dua jenis lelang, yang pertama lelang serentak eksekusi dan lelang serentak non eksekusi.

"Kami berterimakasih kepada Kemenkeu Jatim atas sinergi yang apik, kegiatan ini berkontribusi untuk penerimaan negara terkhusus penerimaan pajak dari pengawasan kepatuhan material penagihan," jelasnya.

Diketahui, lelang serentak eksekusi diikuti oleh 31 satuan kerja dengan total aset 79 dan jumlah

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tunggak Pajak, Kemenkeu...

nilai limit Rp 20 miliar. Sedangkan, non eksekusi diikuti oleh 14 satuan kerja dengan jumlah nilai limit Rp 736 juta.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I yang mewakili Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Jawa Timur Untung Basuki menyampaikan, kegiatan lelang serentak yang dilaksanakan, untuk optimalisasi penerimaan negara dengan memastikan

seluruh piutang negara bisa ditagih dengan baik dan semaksimal mungkin.

Menurutnya, objek yang dilelang secara daring adalah aset sitaan sampai dengan triwulan III tahun 2023, dimana ada 79 lot yang dilelangkan.

"Kegiatan lelang serentak ini telah terselenggara dua kali di tahun ini pertama bulan Mei di Malang dan yang kedua November," tuturnya. (dik/vga)



mencari perampokan ke pasar-pasar sekitar. Namun, saat itu posisi masih gelap, saksi pun agak sulit mencari orang.

Akhirnya, dia bertemu dengan salah seorang warga yang hendak ke Pasar Krembung. Akan tetapi, warga

Serahkan Sertifikat...

ketemu, ahli warisnya juga belum ketemu dan ini masih on proses," ucapnya.

Gus Muhdlor yakin permasalahan tanah di Sidoarjo akan tuntas secara perlahan dan pasti. Beberapa PR yang lainnya juga akan ia selesaikan. (sai/vga)

Jelang Pemilu,...

Rencananya, program tersebut akan terus berjalan hingga Januari mendatang. Setiap hari, tersedia 350 keping blangko yang siap dicetak di MPP.

Reddy mengimbau warga yang ingin

mengurus atau mencetak e-KTP untuk datang langsung ke MPP. Proses itu dapat dilakukan dengan membawa surat tanda terima yang diperoleh melalui plavon dukcapil.

"Tanda terima dari plavon dicetak dan dibawa ke MPP untuk mencetak e-KTP-nya," ungkapnya.

Selain di MPP, warga yang telah mendaftar melalui plavon juga dapat mencetak di kantor kecamatan masing-masing.

Meskipun kuotanya tidak sebanyak di MPP. Dengan setiap kecamatan mendapatkan jatah 150-200 keping blangko setiap minggu. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MEMBESAR: Petugas damkar membasahi lahan yang terbakar di Taman.

Lahan Kosong di Taman Terbakar, Nyaris Sambar Bangunan

TAMAN-Api mengamuk di lahan kosong Jalan Raya Sadang, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kamis (23/11). Kebakaran yang terjadi sempat membuat warga sekitar geger. Pasalnya api nyaris merembet ke bangunan di sekitar.

Kebakaran yang terjadi merupakan lokasi lahan kosong yang digunakan

sebagai tempat pembuangan Tangki Air Fiber. "Saya melihat tiba-tiba api muncul dari lahan kosong tersebut," kata warga sekitar, Firman.

Dia menyampaikan, api tiba-tiba menjalar dengan cepat. Pria 42 tahun tersebut mengungkapkan jika kebakaran semakin meluas dan api semakin membesar. Warga lainnya

pun segera menghubungi damkar.

Saat kejadian, warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, api tak kunjung padam dan asap semakin tebal.

Diduga, kebakaran itu terjadi akibat bakar-bakar sampah. Sehingga, merembet dan api yang awalnya kecil menjalar menjadi besar.

Kebakaran terjadi di lahan seluas 4.000 meter persegi dan area yang terbakar hanya 1.000 meter persegi.

Pemadam kebakaran dari Pos Buduran langsung datang untuk mengatasi kebakaran tersebut. Danru Damkar Pos Buduran Ilham Jagat menjelaskan, api berhasil dikendalikan dalam waktu 30 menit. (dik/vga)





LOEFF/DUTA

Wabup Sidoarjo Subandi datangi warga dusun Alastipis Desa Pabean Rabu(22/11/23)

Jenguk Langsung Warga Sakit

SIDOARJO - Keprihatinan dan kepedulian bisa datang dan menimpa siapa saja, seperti yang menimpa Nuratim (60) warga Dusun Alastipis RT. 2 RW. 1 Desa Pabean, Sedati, yang sedang sakit, Kamis (22/11/23) dikunjungi oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi. Nuratim mengidap penyakit diabetes dan TBC.

Kondisi saat ini, Nuratim masih bisa jalan dan duduk, badannya tidak lemas, meskipun kehilangan banyak berat badan. Berat badan sebelum sakit 54 Kg sekarang tinggal 36 Kg. Pengobatan selama ini, dengan rawat jalan.

"Saya minta pihak Puskesmas, dan RSUD Sidoarjo untuk memantau langsung untuk rawat jalannya. Karena belum punya BPJS, maka Pemkab akan mengcover BPJS-nya dan keluarga, barangkali suatu saat nanti dibutuhkan Ketika akan berobat ke rumah sakit.

Menurut Subandi, Pemkab Sidoarjo setiap tahun menyiapkan anggaran Rp. 60 Miliar untuk membantu warga kita yang tidak mampu, sambil menunggu program Universal Health Coverage (UHC) berjalan. Begitu program ini berjalan anggarannya sudah siap.

"Jika ada warga kurang mampu di Sidoarjo yang mengalami sakit dan belum punya BPJS Kesehatan pemerintah harus hadir. Masyarakat juga harus peka terhadap lingkungannya, jika ada yang sakit dan tidak mampu segera laporkan ke kepala desa, biar nanti ditindaklanjuti untuk pengobatannya," lanjutnya.

Ibu Wakil Bupati Sidoarjo, Sriatun Subandi, yang berprofesi dokter yang juga turut mendampingi kunjungan orang sakit ini. Dia dulu pernah PTT di Puskesmas Sedati, Nuratim ini termasuk pasien yang rutin periksa ke Puskesmas. Akhir-akhir ini mungkin tidak ada yang mengantar ke Puskesmas, jadi kondisinya menurun.

"Sama anaknya dibelikan alat cek kadar gula dan tensi darah, hanya tinggal membeli obat saja. Resep obat yang dari dokter dulu dicopy dan dibelikan di apotik, sehingga tidak perlu periksa ke Rumah Sakit. Ini yang tidak dianjurkan," jelasnya.

Turut mendampingi kunjungan ke rumah warga, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Camat Sedati beserta forkopimka kecamatan Sedati, Kepala Puskesmas Sedati. • Loe

Menteri Agraria Serahkan 50 Sertifikat Korban Lapindo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menegaskan komitmennya terhadap kebijakan pengurusan sertifikat hak milik (SHM) bagi warga korban Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Kamis (23/11).

Pada acara penyerahan simbolis 50 sertifikat kepada warga yang direlokasi di Perumahan Renojoyo, Menteri Hadi menjelaskan bahwa proses ini dilakukan secara gratis, sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan pemulihan kepada masyarakat yang telah mengalami dampak bencana alam.

Dalam kesempatan wawancara, Menteri Hadi menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam peng-

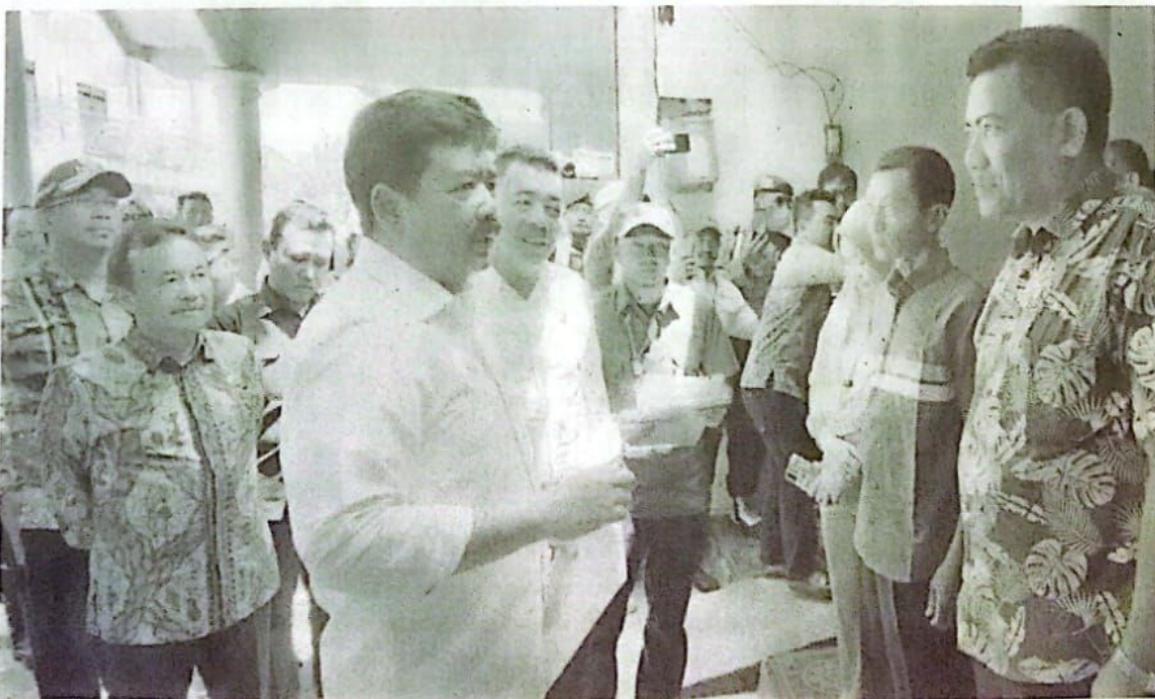
urusan sertifikat ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk tidak membebankan biaya kepada warga yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah mereka.

“Rakyat tidak boleh dibebani dengan permasalahan seperti ini, terutama setelah mereka mengalami peristiwa alam yang mengharuskan mereka dipindahkan dan direlokasi,” tegas Menteri Hadi.

Selain itu, Menteri Hadi memberikan peringatan serius kepada oknum BPN atau pihak lain yang mungkin mencoba memanfaatkan situasi ini dengan meminta biaya kepada warga. Ia meminta warga untuk segera melaporkan apabila menemui praktik pungutan biaya yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

“Saya sudah perintahkan Kapolres sama Dandim untuk masalah ini. Karena ini adalah permasalahan rakyat, rakyat tidak boleh dibenahi dengan permasalahan permasalahan seperti ini. Karena rakyat sudah dibebani dengan peristiwa alam yang harus dipindahkan dan direlokasi,” tegas Hadi didampingi Kakanwil BPN Jatim, Jonahar.

Dalam proses penyelesaian 353 sertifikat, Menteri Hadi menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada keterlibatan mafia tanah yang akan merugikan warga korban Lumpur Lapindo. Ia menjelaskan bahwa hampir 80 persen dari sertifikat yang diserahkan hari ini gratis, termasuk biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemda setempat, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (md/rus)



Kakanwil BPN Jatim Jonahar (kiri) menyaksikan Menteri ATR/ BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat milik warga korban Lumpur Lapindo.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Disepakati Rp 93,4 Juta

Sambungan dari hal 1

Angka tersebut pun mendapat banyak protes dari sejumlah pihak, termasuk Komisi VII DPR, karena dinilai terlalu tinggi.

Hingga akhirnya, dalam rapat panja antara Kemenag dan komisi VII pada Rabu (22/11) malam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief menyampaikan, usulan angka BPIH turun menjadi Rp 94.385.382 (Rp 94,3 juta).

Hilman mengungkapkan, angka tersebut diperoleh setelah melakukan rasionalisasi pada berbagai aspek komponen haji. Salah satunya biaya penerbangan pergi pulang (pp) jemaah. Dia mengaku telah mendapat angka validnya Rp 33,4 juta. Biaya penerbangan itu naik 2 persen dari tahun sebelumnya.

"Berdasar hasil kajian yang

kami lakukan, BPIH yang sudah kami rumuskan itu berkisar Rp 94,3 juta," ujarnya.

Angka tersebut pun masih menjadi perdebatan serius dalam rapat. Besaran Rp 94,3 juta diminta kembali dipangkas dengan kembali merasionalisasi komponen-komponen haji. Hingga akhirnya disepakati bahwa usulan BPIH 2024 kembali diturunkan menjadi Rp 93,4 juta per orang.

Angka usulan terbaru itu sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan BPIH 2023. Yakni, Rp 90 juta per orang. Kendati demikian, biaya penetapan resmi pun belum diketok.

Rencananya, pembahasan dilanjutkan pada Senin (27/11) dalam rapat Panja BPIH bersama Komisi VIII DPR. Rapat itu juga bakal membahas mengenai formulasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) dan nilai manfaat untuk penyeleng-

garaan 1445 H/2024 M hasil kelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BPIH dan bipih merupakan dua hal yang berbeda. Mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 disebutkan, BPIH merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.

BPIH ini bersumber dari beberapa komponen. Yakni, bipih, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Menurut anggota Panja BPIH Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, jumlah pelunasan yang harus dibayar calon jemaah haji bergantung pada

rapat Panja Komisi VIII DPR dengan BPKH nanti. Sehingga dapat diketahui berapa besaran subsidi atau nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji.

Dia pun memahami, kenaikan BPIH ini dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya kenaikan asumsi kurs dolar Amerika (USD) dari tahun lalu Rp 15.150/USD menjadi Rp 15.600/USD. Selain itu, ada penambahan jumlah makan dari 2 kali menjadi 3 kali sehari dengan tujuan agar calon jemaah haji mendapatkan kalori yang cukup untuk beribadah. Terlebih di musim haji nanti, cuaca diperkirakan mencapai 47-52 derajat Celsius.

"Kepastian berapa biaya pelunasan ongkos naik haji (bipih) yang harus dilunasi calon jemaah akan dibahas antara DPR dan BPKH pada Senin mendatang," ungkapnya kemarin. (mia/c19/ttg)

Sidoarjo Raih Penghargaan MPP Prima

Bupati Muhdlor Minta Pelayanan Publik Lebih Humanis

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diapresiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri). Ini seiring dinobatkannya Pemkab Sidoarjo sebagai pemerintah daerah dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima tahun 2023.

Penghargaan dan apresiasi tersebut diserahkan saat Peresmian Bersama MPP dan peluncuran platform Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (21/11).

Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang juga menerima penghargaan. Selain Sidoarjo, sepuluh pemerintah daerah yang menerima penghargaan diantaranya, Kota Bandung, Kota Pekanbaru dan Kota Surabaya.

Kemendagri RB juga memberikan penghargaan kategori pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. "Hari ini Bapak-Ibu diapresiasi termasuk para Kepala Daerah yang mempunyai semangat membuat pelayanan



Suasana saat Bupati Muhdlor menerima penghargaan dari Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Selasa (21/11).

publik lebih baik," cetus Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas. Anas membeberkan, sekarang ini total MPP yang ada di Indonesia sudah mencapai 175, dan ini adalah sebuah progress yang sangat baik. "Khususnya dalam melaksanakan pelayanan untuk masyarakat," tandasnya.

Bupati Ahmad Muhdlor mengapresiasi kerja keras jajarannya, terutama tim yang dibentuk mengawal inovasi pelayanan publik dan mendampingi OPD guna meningkatkan pelayanan di MPP Sidoarjo.

"Saat ini di MPP ada 24 instansi yang bergabung dengan 142 jenis layanan. Kualitas layanan terus kita dorong, terus dievaluasi dan ditingkatkan agar lebih baik lagi melayani masyarakat," ucap Gus Muhdlor, panggilan karib Ahmad Muhdlor.

Menurut Gus Muhdlor, OPD yang terus didorong dalam pelayanan publiknya seperti DPMTSP yang tugasnya mengelola MPP, melayani perizinan usaha dan penanaman modal. Lalu Disdukcapil yang melayani administrasi kependudukan, BPPD yang



Bupati Ahmad Muhdlor menerima penghargaan dari Menteri PAN RB, Selasa (21/11).

melayani pembayaran pajak daerah seperti PBB dan pajak usaha.

"Ketiga OPD ini pelayanan publiknya harus prima. Oleh karena itu tidak ada kata berhenti dalam berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan harus humanis, dinamis dan cepat," cetus Gus Muhdlor didampingi Kepala DPMTSP Rudi Setiawan dan Kepala BPPD Ari Suryono.

Gus Muhdlor menegaskan dirinya tidak lantas berpuas diri dengan capaian tersebut. Ia terus mendorong pelayanan disetiap instansi harus berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkab. Diketahui RSUD Sidoarjo sudah naik kelas menjadi tipe A.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi atensi Bu-

pati Ahmad Muhdlor. Tahun ini Pemkab Sidoarjo memiliki 30 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan.

"Kita sudah punya aplikasi Sipraja untuk kemudahan layanan kependudukan, aplikasi yang terus kita update dan dikembangkan jenis layanannya untuk memberikan kecepatan layanan dan kemudahan lewat layanan online," pungkas alumni Fisip Unair ini. (sta/adv)



DPRD KABUPATEN SIDOARJO "Sidoarjo Gemilang, Maju dan Inovatif"

MELAYANI DAN MENGAWAL ASPIRASI RAKYAT

Upaya Antisipasi Kebakaran Menimpa Gedung Sekolah

Komisi D DPRD Sidoarjo Usulkan Gedung Sekolah Dilengkapi APAR

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Kebakaran yang juga berpotensi melanda bangunan sekolah mendapatkan perhatian dari Komisi D DPRD Sidoarjo. Komisi yang membidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ini meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat memperhatikan masalah tersebut.

Salah satu upaya pengantisipasi agar fasilitas pendidikan tersebut aman dari bencana kebakaran, Komisi D DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo agar melengkapi fasilitas pemerintah termasuk gedung sekolah negeri dengan fasilitas Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Langkah tersebut sebagai antisipasi awal saat terjadi kebakaran di fasilitas pemerintah dan sarana pendidikan sehingga ada penanganan awal sebelum ditangani petugas pemadam kebakaran (damkar). Dengan begitu kerugian akibat kebakaran bisa ditekan seminim mungkin.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdullah Nashih, usai bersama rombongan Komisi D melakukan sidak ke SDN Jenggot Kecamatan Krembung yang mengalami kebakaran pada Kamis (16/11) lalu. Sebagai informasi, tiga ruang

kelas SDN Jenggot terbakar. Ruang kelas yang terbakar yakni kelas 4.5 dan 6. Ruang kantor guru juga ikut hangus terbakar dilalap si jago api.

"Ke depannya, sarana-sarana milik Pemkab, termasuk gedung sekolah harus dilengkapi APAR," cetus Abdullah Nashih, sesaat usai melakukan sidak ke lokasi SDN Jenggot Kecamatan Krembung yang terbakar, Kamis (16/11) lalu.

Nashih menyatakan, pihaknya juga akan berupaya mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan APAR khususnya untuk gedung-gedung sekolah negeri. "Iya kita usulkan itu, terutama diidulhulukan sekolah-sekolah yang dekat pemukiman dan aksesnya sulit," tegasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, komisinya bakal segera membahas perihal tersebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo dan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo.

Sedangkan terkait pasca kebakaran yang terjadi di SDN Jenggot, Abdullah Nashih meminta Dikbud Sidoarjo segera mengambil langkah-langkah darurat atau jangka pendek agar proses belajar mengajar tidak terganggu.

"Kalau bisa kegiatan belajar jangan sampai berhenti. Misalnya dengan memanfaatkan ruang kelas yang ada, namun dengan sistem shift (gantian) Kelas 1, 2, 3 masuk pagi. Siangnya bisa dipakai untuk siswa kelas 4, 5 dan enam," tandas politisi asal Kecamatan Waru ini.

Nashih juga meminta agar petugas BPBD juga ikut menangani reruntuhan ruang kelas yang terbakar, sehingga aman dan tidak membahayakan para siswa SDN tersebut.

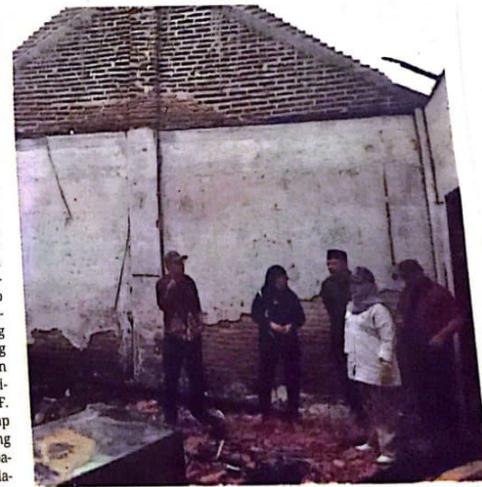
Diketahui, sidak Komisi D ke SDN Jenggot yang mengalami kebakaran ini, juga diikuti Sekretaris Komisi D Kasipah (Fraksi PDIP), dan anggota Komisi D, yakni Aditya Nindiyatman (Fraksi PKS) dan Rizza Ali Faizin (Fraksi PKB). Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi D ditemui oleh Kepala SDN Jenggot, Diah Esti Mordini dan beberapa guru SDN Jenggot. Terpisah, anggota Komisi D DPRD

Sidoarjo Aditya Nindiyatman menjelaskan, Kabupaten Sidoarjo memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang bangunan gedung. "Perda tersebut memberikan perizinan berupa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua gedung, tak terkecuali milik pemerintah," cetusnya, Rabu (22/11).

Nah untuk mendapatkan SLF ini, pemilik maupun pengelola gedung diminta melakukan sejumlah kewajiban. "Dan SLF ini salah satunya mengantar hal-hal untuk mengantisipasi kebakaran," tandas Aditya, yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo.

Aditya pun meminta agar segera dilakukan audit ke seluruh bangunan gedung yang dimiliki Pemkab Sidoarjo. Tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak gedung Pemkab Sidoarjo yang memang layak untuk mendapatkan SLF. Dan seberapa banyak gedung yang tidak layak untuk mendapatkan SLF.

"Kita segera melakukan roadmap kepada seluruh bangunan gedung yang Pemkab miliki untuk mendapatkan segera SLF demi untuk keselamatan dan kesehatan dan kepentingan banyak orang," pungkas mantan Ketua DPD PKS Sidoarjo ini. (sta/adv)



GERAK CEPAT: Rombongan Komisi D DPRD Sidoarjo sidak ke SDN Jenggot Krembung yang terbakar, Kamis (16/11) lalu.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Jawa Pos

Lelang Serentak 79 Aset dan Barang Penunggak Pajak

SIDOARJO - Kemenkeu (Kementerian Keuangan) I Jawa Timur (Jatim) di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II kemarin (23/11) melaksanakan lelang sitaan 79 barang secara serentak. Yang dilelang beragam. Mulai sepeda motor, mobil, barang elektronik, ponsel, sepeda, hingga logam mulia. Tidak hanya itu, beberapa aset seperti bangunan juga dilelang. Semuanya merupakan milik wajib pajak yang menunggak pajak bertahun-tahun.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin mengatakan, lelang eksekusi tersebut diikuti 31 Kantor Pelayanan Pajak dan satu Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. "Hal ini untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memberikan efek jera kepada penunggak pajak," jelasnya.

Selain efek jera, kegiatan tersebut menjadi edukasi serta pelajaran agar wajib pajak tidak menunggak. "Wewenang DJP untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas aset dan barang penunggak pajak," jelasnya.

Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Eka Sila Kusna Jaya mengatakan bahwa lelang serentak dibagi menjadi lelang serentak eksekusi dan lelang serentak noneksekusi. Total 79 aset



SEGERA BERGANTI PEMILIK: Beberapa barang yang disita akibat wajib pajak menunggak pajak ditata di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II kemarin. dan barang yang akan dilelang bernilai Rp 20 miliar. Sementara itu, total lelang noneksekusi senilai Rp 736 juta. "Aset tersebut bisa dicek langsung ke *website* resmi

DJP atau Kementerian Keuangan," katanya.

"Kegiatan lelang serentak ini telah terselenggara dua kali di tahun ini. Pertama bulan Mei di Malang dan

yang kedua November hari ini," tuturnya. Penjualan barang sitaan merupakan tindakan penagihan yang dilakukan setelah adanya penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Hal tersebut sesuai dengan UU No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. "Sebelum penyitaan, petugas telah melaksanakan pendekatan persuasif," tuturnya. (eza/c6/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Ratusan santri pesantren Progresif bumi sholawat Sidoarjo ikuti FGD Kamis (23/11/23)

LOEFT/DUTA

Ratusan Santri Gelorakan Moderasi Beragama

SIDOARJO - Jaringan Penggerak Moderasi Beragama Nusantara Jawa Timur (JPMBN) menggelar focus group discussion (FGD) penguatan moderasi beragama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama multi etnis.

FGD yang juga dipertegas dengan pernyataan sikap toleransi dan moderasi beragama itu diikuti ratusan santri di pesantren progresif bumi sholawat Sidoarjo, Kamis (23/11/23).

Ketua Jaringan Penggerak Moderasi Beragama Nusantara Jatim, H. Hasanuddin S.Pdi mengatakan acara itu sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik antar agama, dan menjadi harapan dalam upaya-upaya memperbaiki dan menjaga kerukunan umat beragama.

“Santri kami harapkan dapat memaknai Moderasi beragama sebagai inisiasi untuk mempromosikan harmoni yang berkaitan dengan keagamaan dan menunjukkan nilai-nilai saling menghormati,” kata Hasanudin.

Hasanudin menegaskan, mema-

hami dan kerjasama antara kelompok agama menjadi penting untuk tujuan saling berdamai, empati, dan saling menghargai setiap perbedaan keyakinan.

“Kerjasama adalah sikap yang harus dimiliki setiap individu atau kelompok dalam menerapkan moderasi beragama,” imbuhnya.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemprov Jatim, M. Hendro Gunawan dalam sambutannya mengatakan, Moderasi beragama ini diharapkan dapat menekan munculnya radikalisme, terorisme, konflik sosial dan perselisihan antar etnis yang beragam.

Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.

“Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (hate speech), hingga retaknya hubungan antar umat beragama, merupakan problem yang harus segera dibenahi. Hal itu muncul

akibat cara pandang yang sempit terhadap agama, sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima ada pendapat yang berbeda,” jelas Hendro Gunawan.

Menurut Hendro, gerakan untuk merajut toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan harus terus ditumbuhkan dengan memunculkan dialog-dialog lintas agama serta solidaritas tanpa batas harus terus diupayakan melalui simbol-simbol kerukunan dan toleransi di berbagai daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama di Jawa Timur diantaranya, Kepala Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Jatim Agus Imantoro, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemnag Jatim Drs. Mohammad As’adul Anam, M.Ag

Serta dari pihak TNI, Polri, Kasubdit Sosbud Direktorat Intelkam Polda Jatim AKBP Agus Prasetyo, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Guntung Dwi Prasetyo serta Kasdim 0816 Sidoarjo Mayor Chb Supriyanto. ●Loe

CS Dipindai dengan CamScanner

DUTA



SIDOARJO DALAM ANGKA



Perbaiki 567 Rumah Tidak Layak Huni

SEPANJANG tahun ini, ada 567 rumah tidak layak huni (RTLH) yang diperbaiki di Sidoarjo. Perbaikan tersebut dilakukan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo; Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jawa Timur; serta program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. (uzi/c14/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SETELAH MENANTI BELASAN TAHUN, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto (kiri) menyerahkan sertifikat tanah hasil program PTSU di Perumahan Reno Jaya, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, kemarin (23/11).

Menteri ATR/ Kepala BPN Serahkan Sertifikat Tanah Korban Lumpur Sidoarjo

SIDOARJO - Warga Perumahan Renojaya, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, akhirnya mendapatkan sertifikat tanahnya kemarin (23/11). Warga korban lumpur Sidoarjo yang dulunya berasal dari Desa Renokenongo itu baru mendapatkan sertifikat setelah belasan tahun menunggu.

Ada 650 warga yang dulunya pindah dari Renokenongo ke Kedungsolo karena terdampak lumpur. Mereka menempati area baru yang belum ada sertifikatnya. Seiring berjalan waktu, mereka mengajukan legalitas tanah tersebut. Berbagai proses dilewati. Akhirnya, sertifikat tanah mereka sudah tuntas.

Kemarin ada 353 orang dari 650

pengajuan yang mendapatkan sertifikat. Sisanya, masih proses penerbitan. Secara simbolis, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto didampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali membagikan sertifikat ke 50 warga.

Hadi membagikan langsung ke 10 titik dengan mendatangi langsung rumah warga. Hadi mengatakan, hampir 15 tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanah yang ditinggalkannya. Saat ini, proses penerbitan sudah selesai. Lamanya proses penerbitan sertifikat itu lantaran harus melalui sejumlah proses hukum. Sebab, ada sejumlah

tanah negara yang ditempati. Yakni, tanah kas desa (TKD).

"Rata-rata penerbitan sertifikatnya gratis, hanya ada lima yang membayar," katanya.

Mereka membayar sesuai dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tanah. "Total kurang dari Rp 600 ribu," katanya. Yakni, untuk proses pengukuran, biaya panitia, dan biaya pendaftaran. Hadi juga mengapresiasi Pemkab Sidoarjo yang memberikan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kepada warga korban lumpur tersebut.

"Kami koordinasi terus dengan BPN Sidoarjo, kami dampingi warga," kata Ahmad Muhdlor. (uzi/c17/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos